

Prabowo Segera Bentuk Satgas

Dari Halaman 1

global. Menanggapi usulan tersebut, Prabowo secara terbuka menyatakan sepakat dan mengapresiasi inisiatif dari Said Iqbal. Ia bahkan meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti pembentukan Satgas PHK tersebut. "Yang lebih saya tertarik usulnya si Pak Said ini ya adalah Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik. Saya terima kasih," ujar Prabowo. Prabowo juga menyebutkan dirinya sangat menghargai usulan pembentukan Satgas PHK tersebut, karena bisa menjadi instrumen pemerintah untuk mengantisipasi sekaligus mencari solusi atas potensi lonjakan PHK ke depan. Menurutnya, Satgas PHK nantinya harus melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, serikat buruh, akademisi, hingga BPJS Ketenagakerjaan. "Saya kira bentuk Satgas PHK segera. Libatkan pemerintah, libatkan Serikat Buruh, libatkan dunia akademi ya, libatkan rektor-rector, libatkan BPJS dan sebagainya. Satu Satgas kita antisipasi," tegasnya. "Tapi saya ingin yakinkan ya kepada seluruh unsur Serikat Buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, negara kita

harus dikelola sebagai satu keluarga," imbuah Prabowo. Selain membentuk Satgas PHK, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melindungi dan membantu para buruh atau pekerja yang menjadi korban PHK. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah, kata Prabowo, adalah memperpanjang perlindungan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari sebelumnya tiga bulan menjadi enam bulan. "Kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu, dan sudah pada tidak boleh terlalu risau khawatir. Perlu, ya kalau orang tidak khawatir mungkin orangnya itu enggak normal, benteng? Jadi kita waspada perlu, tapi saya ingatkan kita punya kekuatan," jelasnya. Ia juga memastikan Satgas PHK yang dibentuk nantinya tidak hanya mencatat data PHK, tetapi juga bertugas menghubungkan para korban PHK dengan peluang kerja baru. Prabowo menyebut pemerintah tengah merancang sejumlah proyek besar, seperti tambakan di pantai utara Jawa hingga pengembangan pertanian, untuk menciptakan lapangan kerja baru. Prabowo menyebut pemerintah tengah merancang sejumlah proyek besar, seperti tambakan di pantai utara Jawa hingga pengembangan pertanian, untuk menciptakan lapangan kerja

baru. "Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match, dan pemerintah akan bantu," tegas Prabowo. Menurutnya, Satgas PHK bisa menjadi jembatan penting untuk memastikan setiap korban PHK mendapatkan perlindungan dan kesempatan kerja yang layak, meski mungkin penempatannya tak selalu di daerah asal pekerja tersebut. "Tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, ya kita tawarkan yang PHK saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan atau di Halmahera atau di Waingapu atau di Merauke. Dari situ, 'oh tidak mau, saya hanya mau di Brebes', ya tidak bisa dong," ujar Prabowo. Prabowo pun menegaskan bagi dirinya, melindungi dan membantu buruh bukan sekadar kewajiban, melainkan kehormatan sebagai seorang pemimpin. "Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa, ini kehormatan saya. Kehormatan saya, saya tidak mau jadi pemimpin ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah," tegasnya. **(cnni/js)**

Presiden KSPSI:

Dari Halaman 1

"Satgas PHK yang bertugas nantinya meminimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah," kata Andi Gani usai mengikuti Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025). Andi Gani menilai, Satgas PHK dibentuk tujuannya untuk mengantisipasi kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen pada produk Indonesia. Karena, akan sangat berdampak pada sektor industri sepatu maupun tekstil di Indonesia. "Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS," jelasnya. Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan, Sarasehan Ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto membangkitkan optimisme gerakan buruh untuk dapat menghadapi masalah perang tarif dagang yang dapat mengakibatkan potensi PHK besar besaran. "Sarasehan Ekonomi yang melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto," ucapnya. Sementara, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh terkait dengan pembentukan Satgas PHK. Menurutnya, pembentukan satgas penting untuk mengantisipasi PHK. Prabowo mengatakan, Satgas PHK itu nantinya akan berisi para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan serikat buruh. "Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rector, libatkan BPJS dan sebagainya," kata Prabowo. Eks Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah. "Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan Pemerintah akan bantu," ujarnya. Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. "Kalau umpamanya, ada perusahaan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke," jelasnya. **(A-10)**

Janji Ciptakan 8 Juta Lapangan Kerja

Dari Halaman 1

nara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4). Di lain sisi, lapangan pekerjaan juga diklaim bakal tercipta dari sektor kelautan dan perikanan. Prabowo menegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sedang merancang pembangunan tambak ikan dan udang

Ia menyebut bakal menggunakan potensi Indonesia di bidang kelautan melalui budi daya ikan, udang, serta lobster. Menurutnya, itu semua adalah potensi protein yang dibutuhkan dunia. Sang Kepala Negara juga menyinggung soal potensi rumput laut alias seaweed. "Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia. Kita rencananya segera akan kita mulai tahun ini, di Pantai Utara (Pantura) Jawa 20 ribu hektare tambak ikan. Satu hektare akan menyerap

2 pekerja-3 pekerja, 20 ribu hektare artinya minimal 40 ribu orang bekerja," jelas Prabowo. "Rencana kita sampai dengan 40 ribu hektare (tambak) akan kita mulai dalam waktu dekat, segera. Itu di Pantai Utara Jawa ... Jadi, kita akan buka lapangan-lapangan kerja baru," sambungnnya. Di lain sisi, pemerintah juga akan membuka tambak di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 2.000 hektare. **(cnni/js)**

Komisi III DPR RI Soroti Kasus

Dari Halaman 1

merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Kasus ini sempat ramai diperbincangkan, dan beberapa staf Kemen-PUPR telah ditahan atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi tersebut. "Saya juga meminta kejelasan atas kasus korupsi Rp2,7 triliun di Pemprov Sumut. Katanya sudah sampai tahap penyelidikan, maka segera laporkan dan publikasikan perkembangannya agar

tidak dianggap main-main," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Selain itu, Mangihut Sinaga juga menyoroti kasus penyerobotan tanah oleh PT Padasa Enam Utama di Asahan. Menurutnya, kasus ini telah berlangsung bertahun-tahun dan masyarakat merasa dirugikan tanpa adanya penyelesaian hukum yang jelas. Meski Kapolres setempat telah meninjau lokasi, belum ada kepastian terkait tindak lanjut hukumnya. "Masalah penyelesaian tanah di Asahan yang

digarap PT Padasa ini sudah bertahun-tahun dilaporkan ke Kapolda dan Kajati, tapi belum ada respons. Masyarakat bahkan berencana unjuk rasa. Saya berharap kasus ini segera diproses," ujar Mangihut dalam pertemuan, dikutip dari laman DPR RI, Rabu (8/5/2025). Mangihut menekankan, Komisi III DPR RI akan terus mengawasi penyelesaian kasus-kasus ini agar tidak berlarut-larut dan memastikan aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan akuntabel demi keadilan bagi masyarakat. **(bes/bj)**

Solak Diguncang Gempa Magnitudo 4,2

Dari Halaman 1

terjadi akibat aktivitas Sesar Sumani. "Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktifitas Sesar Sumani," kata dia. Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa bumi dirasakan di Kabupaten Solok dan Kota

Solak dengan skala III - IV MMI Atau getaran dirasakan oleh banyak orang dan terasa nyata dalam rumah, seakan-akan ada truk berlalu. Jendela, pintu, atau dinding berbunyi. "Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut," katanya lagi. Sesaat setelah terjadi gempa utama, terjadi satu kali gempa susulan dengan magnitudo 2,4 pada kedalaman 7 kilometer.

"Hasil monitoring BMKG terdapat satu aktifitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan M 2.4," Suaidi menambahkan. Pihak BPBD Kabupaten Solok sender masih mengumpulkan informasi dari Lapangan, apakah gempa tersebut membawa dampak atau tidak. "Kami sedang mengumpulkan informasi dari Lapangan," kata Irwan Effendi, Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Solok kepada wartawan. **(cnni/js)**

Ulama Dunia Serukan Jihad Lawan Israel.....

Dari Halaman 1

dilancarkan Israel di Jalur Gaza, Palestina. Dalam pernyataan resmi, Qaradaghi menegaskan bahwa ketidakmampuan pemerintah Arab dan Islam dalam membela Gaza saat sedang dihancurkan merupakan kejahatan besar menurut hukum Islam. "Oleh karena itu, dan dalam rangka memenuhi kepercayaan yang diberikan Allah kepada para ulama, Komite Ijtihad dan Fatwa IUMS menyajikan keputusan-keputusan berikut tentang agresi Zionis yang sedang berlangsung," ujar Qaradaghi dalam fatwanya. Qaradaghi merupakan salah satu tokoh agama paling dihormati di kawasan Timur Tengah. Fatwa yang dikeluarkannya amat berpengaruh di kalangan 1,7 miliar Muslim Sunni di dunia. Fatwa merupakan keputusan hukum Islam yang tidak mengikat dan biasanya dikeluarkan oleh ulama terkemuka. Ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan Al Quran atau sunnah (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW). Ulama kelahiran Irak mengeluarkan fatwa berisi 15 poin yang didukung oleh 14 ulama Muslim terkemuka lainnya. Berikut 15 poin lengkap fatwa Qaradaghi. 1. Serukan Jihad M elawan Israel Dalam fatwanya, Qaradaghi mendesak umat Islam berjihad melawan negeri Zionis dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pendudukan di Palestina. Ia menyerukan Muslim melakukan intervensi militer sekaligus memasok persenjataan, keahliaan, dan intelijen kepada para kelompok perlawanan. "Ini merupakan kewajiban yang mengikat, pertama bagi rakyat Palestina, kemudian bagi negara-negara tetangga (Mesir, Yordania, dan Lebanon), serta semua negara Arab dan Muslim. Jihad melawan pendudukan adalah kewajiban individu (fardu ain) atas setiap Muslim yang mampu," ucapnya, dikutip dari laman IUMS.

Lebih lanjut, Qaradaghi meminta pemerintah negara mayoritas Muslim untuk segera turun tangan secara militer, ekonomi, dan politik guna menghentikan genosida. Sebab, kata dia, mengabaikan dan meninggalkan Gaza dengan kondisi demikian merupakan "dosa besar" serta pengkhianatan terhadap tanggung jawab kepemimpinan. 2. Larang Dukung Israel dalam Bentuk Apapun Pada poin keduanya, Qaradaghi melarang keras umat Islam mendukung Israel dalam bentuk apa pun. "Ini termasuk larangan menjual senjata, memfasilitasi transportasinya melalui koridor internasional seperti Terusan Suez, Bab Al Mandab, Selat Hormuz, atau melalui darat, laut, dan udara," ucap Qaradaghi. Sang ulama kemudian menyatakan bahwa komite telah memutuskan bahwa blokade penuh, baik di darat, laut, maupun udara harus diberlakukan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung Negeri Zionis. 3. Larang Pasok Sumber Daya Qaradaghi juga mengatakan memasok sumber daya seperti minyak bumi, gas, dan lainnya kepada Israel adalah larangan keras lantaran dapat digunakan dalam serangan Israel ke Gaza. Ia juga melarang keras Muslim menyediakan makanan dan air bagi warga Israel karena masyarakat Palestina sendiri saat ini tengah kelaparan. "Siapa pun yang melakukannya karena cinta terhadap Zionis dan dengan maksud melemahkan perlawanan Palestina, adalah murtad. Jika dilakukan demi meraup keuntungan, merupakan dosa besar dan pengkhianatan besar," tegasnya. 4. Serukan Persatuan Aliansi Militer Di poin keempat, Qaradaghi menyatakan bahwa negara-negara Muslim dan Arab wajib membentuk aliansi militer terpadu guna mempertahankan tanah Islam dan melindungi agama, kehidupan, kekayaan, kedaulatan, serta kehormatan Palestina. "Mereka harus menekan pemerintah, militer, dan lembaga untuk memenuhi tanggung jawab agama, sejarah, dan moral mereka," tukasnya. **(cnni/js)**

matan Palestina. "Kewajiban ini mendesak dan tidak boleh ditunda karena penundaan akan berujung pada korupsi dan meluasnya fitnah," tulis Qaradaghi. 5. Tinjau Kembali Perjanjian dengan Israel Qaradaghi turut meminta negara-negara Muslim meninjau kembali perjanjian dengan Israel dan menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk menekan Negeri Zionis. Ia menekankan perjanjian harus dibuat dengan maksud melayani kepentingan umat Islam. Perjanjian apa pun dengan Israel mesti dievaluasi kembali untuk dilihat apakah Israel telah patuh atau melanggarnya. 6. Wajibkan Jihad Keuangan Dalam fatwanya, Qaradaghi menyatakan bahwa setiap Muslim yang mampu wajib berjihad dalam bentuk uang guna memperlengkapi mujahidin dan mendukung warga Palestina. 7. Larang Normalisasi Qaradaghi dan Komite Ijtihad dan Fatwa IUMS juga menegaskan bahwa upaya normalisasi dengan Israel dilarang bagi setiap negara Muslim dan mayoritas Islam. Mereka sebaliknya mewajibkan negara yang telah rujuk dengan Israel untuk memutuskan hubungan tersebut. "Diwajibkan oleh agama Islam bagi seluruh negara Muslim yang telah menormalisasi hubungan [dengan Israel] untuk memutuskan hubungan tersebut demi mendukung kaum tertindas dan menghindari hal-hal yang melanggar ajaran Islam," demikian fatwa IUMS. 8. Desak Ulama Bersuara Qaradaghi turut menekankan bahwa ulama dan pemuka agama wajib bersuara untuk mengatakan kebenaran, menentang pengkhianatan dan keheningan, serta menyerukan jihad melawan Israel. "Mereka harus menekan pemerintah, militer, dan lembaga untuk memenuhi tanggung jawab agama, sejarah, dan moral mereka," tukasnya. **(cnni/js)**

Trump Tak Pakai Ilmu Ekonomi

Dari Halaman 1

negara-negara yang berkawan. Namun, sekarang aksi Trump dianggap justru menghapuskan benefit dari persahabatan antar-negara. Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani membedah bagaimana korban tarif Trump bereaksi. Ini termasuk retaliasi dari China yang tegas melawan AS dengan menetapkan tarif balasan 34 persen. Ani mengatakan aksi China kemudian dibalas lagi Presiden AS Donald Trump yang mengancam menambah tarif impor dari 34

persen menjadi 50 persen. Anak buah Prabowo itu kemudian melihat bagaimana langkah Vietnam yang 'melunak' agar tarif 46 persen bisa dinolkan. Sayangnya, niat Vietnam yang menihilkan tarif impor terhadap produk AS agar terbebas dari tarif resiproskal nyatanya tak mendapat sambutan baik. "Berbagai negara yang lain mungkin kepalanya lebih dingin dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi, tapi not necessarily hasilnya juga menyenangkan. Karena seperti

Vietnam yang mengatakan promise untuk 0 persen tarif dikatakan (AS) itu tidak memadai. Karena non-tariff barrier juga menjadi salah satu bagian yang menjadi negosiasi," tutur Ani. "Timeline ini (penetapan tarif Trump) menggambarkan hanya dalam waktu 1 bulan, dunia yang tadinya rule based sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi tidak bisa terus-menerus terkejut-kejut. Namun, pada saat yang sama kita tetap waspada," tandasnya. **(cnni/js)**



PHK Massal di Tengah Ketidakpastian

Dari Halaman 1

Di balik setiap PHK, ada wajah cemas, dapur yang terancam padam, dan masa depan yang menjadi buram. Negara dengan tingkat ketergantungan tinggi pada konsumsi domestik seperti Indonesia tak boleh memandang enteng persoalan ini. Setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan sesungguhnya adalah indikator menurunnya daya beli, terganggunya siklus ekonomi lokal, serta potensi meningkatnya ketimpangan sosial. Lebih ironis lagi, banyak PHK dilakukan tanpa komunikasi yang terbuka dan etis. Informasi mendadak, tanpa kejelasan kompensasi, atau bahkan tanpa pernyataan resmi. Di sinilah krisis bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal komunikasi. Perusahaan perlu menyadari bahwa hubungan industrial yang sehat harus dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan penghargaan atas martabat pekerja. Dalam dunia komunikasi strategis, kita mengenal prinsip manajemen krisis. Salah satu kunci utamanya adalah bagaimana menyampaikan kabar buruk dengan cara yang bertanggung jawab. PHK bisa saja tak terhindarkan, namun cara menyampaikannya menentukan bagaimana sebuah institusi dikenang. Apakah sebagai entitas yang manusiawi, atau sekadar mesin bisnis yang abai terhadap dampak sosial? Pemerintah, sebagai penjaga keseimbangan sosial, juga harus hadir lebih tegas. Stimulus untuk UMKM, pelatihan ulang tenaga kerja, hingga insentif bagi perusahaan yang mempertahankan karyawan adalah langkah konkret yang harus diperkuat. Transparansi data PHK dan keterlibatan lintas kementerian menjadi sangat penting, agar langkah-langkah penyelamatan tidak hanya reaktif, tapi terencana dan berbasis kebutuhan nyata. Namun di tengah krisis ini, masih ada harapan. Gelombang PHK di beberapa sektor justru memunculkan kreativitas baru. Banyak mantan pekerja mencoba bertahan dengan membuka usaha mikro, menjadi pekerja lepas digital, atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri. Di sinilah momentum membangun ekosistem baru yang lebih inklusif dan tahan guncangan. PHK massal mungkin tak bisa dicegah sepenuhnya. Tetapi bagaimana kita meresponsnya akan menentukan apakah bangsa ini menjadi lebih kuat, atau justru terjerumus dalam jurang ketimpangan baru. Kita butuh kebijakan yang berpihak, komunikasi yang manusiawi, dan kepemimpinan yang hadir, bukan hanya di ruang konferensi pers, tetapi di tengah keresahan rakyat. Krisis ketenagakerjaan ini juga seharusnya menjadi panggilan reflektif bagi dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi. Kurikulum tidak cukup hanya mempersiapkan lulusan untuk "siap kerja", tapi juga untuk "siap bertahan dan beradaptasi" di tengah realitas dunia yang berubah cepat. Kecakapan digital, literasi keuangan, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor harus menjadi bagian integral dari pembelajaran. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya menjadi korban ketidakpastian, tetapi agen yang mampu menavigasi dan bahkan menciptakan masa depan baru. Lebih jauh, krisis PHK massal ini juga menguji kualitas komunikasi publik pemerintah. Dalam situasi yang sarat ketidakpastian, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan konkret, tetapi juga kejelasan informasi, empati dalam penyampaian, dan konsistensi narasi dari para pejabat publik. Komunikasi yang lambat, inkonsisten, atau terlalu teknokratis justru bisa memicu kepanikan, misinformasi, dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, kehadiran juru bicara yang kredibel, kanal komunikasi resmi yang aktif, serta keterlibatan media yang akurat menjadi bagian tak terpisahkan dari penanganan krisis yang beradab dan berkelanjutan.